



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 118 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pelayanan, keamanan, keselamatan, dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial di wilayah Kabupaten Mimika Provinsi Papua, perlu menata organisasi dan tata kerja Unit Penyelenggara Bandar Udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Bandar Udara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

52

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Klasifikasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1331);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 688);

82

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/2828/M.PAN-RB/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara berjumlah 151 (seratus lima puluh satu), terdiri atas:
 - a. 2 (dua) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama;

82

- b. 10 (sepuluh) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I;
 - c. 21 (dua puluh satu) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II; dan
 - d. 118 (seratus delapan belas) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III.
- (2) Satuan Pelayanan Bandar Udara sebanyak 16 (enam belas) Satpel BU.
- (3) Nama, kelas dan lokasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara serta Satpel BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 40A yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 40A
- (1) Peralihan penyelenggaraan layanan kebandarudaraan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara pada bandar udara yang beralih dari bandar udara milik daerah, bandar udara khusus, atau bandar udara militer agar dilaksanakan dengan cara seksama dan mengutamakan kebutuhan pengguna layanan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki para pihak terkait.
 - (2) Pemanfaatan aset pada bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1489

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



RI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR PM 118 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN
2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

DAFTAR KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Propinsi Aceh				
1.	Cut Nyak Dhien Nagan Raya	Nagan Raya	II	
2.	Maimun Saleh	Sabang	III	
3.	Lasikin	Sinabang	III	
4.	Teuku Cut Ali	Tapak Tuan	III	
5.	Rembele	Takengon	III	
	Blangkajeren	Gayo Lues	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Rembele
Prop. Sumatera Utara				
6.	Binaka	Gunung Sitoli	II	
7.	Lasondre	Pulau-pulau Batu	III	
8.	FL Tobing	Sibolga	III	Pinangsori (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
	Sibisa	Parapat	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU FL Tobing
9.	Aek Godang	Padang Sidempuan	III	
Prop. Sumatera Barat				
10.	Rokot	Sipora	III	
Prop. Kepulauan Riau				
11.	Dabo	Singkep	III	
12.	Raja Haji Abdullah	Karimun	III	Sei Bati (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
Prop. Riau				
13.	Japura	Rengat	III	
14.	Pasir Pangaraian	Pasir Pangaraian	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Prop. Jambi				
15.	Depati Parbo	Kerinci	III	
16.	Muara Bungo	Rimbo Bujang	III	
Prop. Bengkulu				
17.	Fatmawati Soekarno	Bengkulu	I	
	Enggano	Enggano	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Fatmawati Soekarno
	Silampari	Lubuk Linggau	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Fatmawati Soekarno
18.	Muko-muko	Muko-muko	III	
Prop. Bangka Belitung				
19.	H. As. Hanandjoedin	Tanjung Pandan	I	
Prop. Lampung				
20.	Radin Inten II	Lampung Selatan	I	
	Pekonserai	Lampung	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Radin Inten II
Prop. Jawa Barat				
21.	Cakrabhuana	Cirebon	III	Penggung (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
Prop. Jawa Tengah				
22.	Tunggul Wulung	Cilacap	III	
23.	Dewa Daru	Karimun Jawa	III	
Prop. Jawa Timur				
24.	Blimbingsari	Banyuwangi	III	Rogojampi (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
25.	Trunojoyo	Sumenep	III	
	Bawean	Gresik	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Trunojoyo
Prop. Nusa Tenggara Barat				
26.	Sultan Muhammad Salahuddin	Bima	II	
27.	Sultan Muhammad Kaharuddin	Sumbawa	III	Brangbiji (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Prop. Nusa Tenggara Timur				
28.	Fransiskus Xaverius Seda	Maumere	II	Wai Oti (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
29.	Umbu Mehang Kunda	Waingapu	II	Mau Hau (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
30.	Komodo	Labuhan Bajo	II	
31.	H. Hasan Aroeboesman	Ende	II	
32.	Frans Sales Lega	Ruteng	III	Satar Tacik (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
33.	Tambolaka	Waikabubak	II	
34.	A.A Bere Tallo	Atambua	III	Haliwen (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
35.	Mali	Alor	III	
36.	Gewayantana	Larantuka	III	
37.	David Constantijn Saudale	Rote Ndao	III	Lekunik (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
38.	Tardamu	Sabu	III	
39.	Soa	Bajawa	III	
40.	Wonopito	Lewoleba	III	
Prop. Kalimantan Barat				
41.	Rahadi Oesman	Ketapang	II	
42.	Susilo	Sintang	III	
43.	Pangsuma	Putusibau	II	
44.	Nangapinoh	Nangapinoh	III	
Prop. Kalimantan Tengah				
45.	Tjilik Riwut	Palangkaraya	I	
46.	Iskandar	Pangkalan Bun	II	
47.	H. Asan	Sampit	II	
48.	Sunggu	Buntok	III	
49.	Beringin	Muara Teweh	III	
50.	Kuala Pembuang	Kotawaringin Timur	III	
51.	Tumbang Samba	Tumbang Samba	III	
52.	Kuala Kurun	Kuala Kurun	III	
Prop. Kalimantan Selatan				
53.	Gusti Syamsir Alam	Kotabaru	II	Stagen (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)

82

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Prop. Kalimantan Timur				
54.	Temindung	Samarinda	II	
55.	Melak	Sendawar	III	
56.	Kalimarau	Tanjung Redep	II	
57.	Datah Dawai	Datah Dawai	III	
Prop. Kalimantan Utara				
58.	Juwata	Tarakan	I Utama	
59.	Seluwing	Malinau	III	
60.	Nunukan	Nunukan	III	
61.	Yuvai Semaring	Long Bawan	III	
62.	Tanjung Harapan	Tanjung Selor	III	
63.	Long Apung	Long Apung	III	
Prop. Sulawesi Utara				
64.	Naha	Tahuna	III	
65.	Melongguane	Sangihe Talaud	III	
Prop. Gorontalo				
66.	Djalaluddin	Gorontalo	I	
Prop. Sulawesi Tengah				
67.	Mutiara Sis-Al Jufri	Palu	I	Mutiara (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
	Morowali	Morowali	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Mutiara
68.	Pogogul	Buol	III	
69.	Syukuran Aminudin Amir	Luwuk	II	Bubung (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
	Tojo Una Una	Tojo Una Una	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Syukuran Aminudin Amir
70.	Sultan Bantilan	Tolo-toli	III	Lalos (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
71.	Kasiguncu	Poso	II	
Prop. Sulawesi Barat				
72.	Tampa Padang	Mamuju	III	
	Sumarorong	Mamasa	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Tampa Padang
Prop. Sulawesi Selatan				
73.	Pongtiku	Makale	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
74.	H. Aroepala	Pulau Selayar	III	
75.	Andi Jemma	Masamba	III	
76.	Bone	Bone	III	
77.	Seko	Seko	III	
78.	Rampi	Rampi	III	
79.	Bua	Luwu	III	
Prop. Sulawesi Tenggara				
80.	Halu Oleo	Kendari	I	Wolter Monginsidi (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
81.	Matahora	Wakatobi	III	
82.	Sangia Ni Bandera	Kolaka	III	
83.	Beto Ambari	Bau-bau	III	
84.	Sugimanuru	Muna	III	
Prop. Maluku Utara				
85.	Sultan Babullah	Ternate	II	
86.	Emalamo	Sanana	III	
87.	Buli	Maba	III	
88.	Kuabang	Kao	III	
89.	Gamar Malamo	Galela	III	
90.	Oesman Sadik	Labuha	III	
91.	Pitu	Morotai	III	
Prop. Maluku				
92.	Ibra	Langgur	III	Dumatubun (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
93.	John Becker	Pulau Kisar	III	
94.	Larat	Pulau Larat	III	
95.	Dobo	Pulau Aru	III	
96.	Mathilda Batlayeri	Maluku Tenggara Barat	III	Olilit (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
97.	Bandaneira	Pulau Banda	III	
	Kuffar	Seram Bagian Timur	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Bandaneira
	Moa	Maluku Tenggara	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Bandaneira
98.	Namlea	Pulau Buru	III	
99.	Namrole	Pulau Buru	III	
100.	Amahai	Pulau Seram	III	
101.	Wahai	Pulau Seram	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Prop. Papua Barat				
138.	Rendani	Manokwari	II	
139.	Domine Eduard Osok	Sorong	I	
	Segun	Sorong	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Domine Eduard Osok
	Werur	Manokwari	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Domine Eduard Osok
140.	Marinda	Waisai	III	
141.	Torea	Fak-fak	III	
142.	Bintuni	Teluk Bintuni	III	
143.	Utarom	Kaimana	III	
144.	Merdey	Manokwari	III	Ijahabra (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
145.	Wasior	Teluk Womdana	III	
146.	Inanwatan	Sorong Selatan	III	
147.	Teminabuan	Sorong Selatan	III	
148.	Babo	Teluk Bintuni	III	
149.	Kambuaya	Manokwari	III	
150.	Kebar	Manokwari	III	
151.	Ayawasi	Sorong Selatan	III	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Prop. Papua				
102.	Sentani	Jayapura	I Utama	
103.	Dabra	Mamberamo Raya	III	
104.	Mopah	Merauke	I	
	Senggo	Mappi	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Mopah
105.	Kamur	Asmat	III	
106.	Kimam	Merauke	III	
107.	Bomakia	Boven Digoel	III	
108.	Senggeh	Keerom	III	
109.	Wamena	Jayawijaya	I	
110.	Elelim	Yalimo	III	
111.	Douw Aturure	Nabire	II	Nabire (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
112.	Bilorai	Intan Jaya	III	
113.	Enarotali	Paniai	III	
114.	Waghete	Deiyai	III	
115.	Mararena	Sarmi	III	
116.	Tanah Merah	Boven Digoel	III	
	Manggalum	Boven Digoel	Satpel BU	
117.	Mulia	Puncak Jaya	III	
118.	Sudjarwo Tjondronegoro	Serui	III	
119.	Oksibil	Pegunungan Bintang	III	
120.	Kiwirok	Pegunungan Bintang	III	
121.	Moanamani	Nabire	III	
122.	Mindiptanah	Boven Digoel	III	
123.	Kepi	Mappi	III	
124.	Kokonao	Mimika	III	
125.	Akimuga	Mimika	III	
126.	Mozes kilangin	Mimika	II	
127.	Bokondini	Jayawijaya	III	
128.	Okaba	Merauke	III	
129.	Numfoor	Biak Numfoor	III	
130.	Illaga	Puncak	III	
	Sinak	Puncak Jaya	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Illaga
131.	Illu	Puncak Jaya	III	
132.	Tiom	Lanny Jaya	III	
133.	Ewer	Asmat	III	
134.	Batom	Pegunungan Bintang	III	
135.	Bade	Mappi	III	
136.	Karubaga	Tolikara	III	
137.	Nop Goliat Dekai	Yahukimo	III	